**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)**

**DESA WONOGIRI**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

****

**DISUSUN OLEH :**

**PEMERINTAH DESA WONOGIRI**

**KECAMATAN KAJORAN KABUPATEN MAGELANG**

**Dsn. Salakan RT 22 Ds.Wonogiri Kec.Kajoran Kab.Magelang**

**Email: pemerintahdesawonogiri@gmail.com**

**TAHUN 2021**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DESA WONOGIRI KECAMATAN KAJORAN**

**KABUPATEN MAGELANG**

**NOMOR : 12 TAHUN 2021**

**TENTANG**

 **KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKPDes )**

 **TAHUN 2022**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOGIRI**

**Menimbang** :a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;

1. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun:
2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Wonogiri Tahun 2022.
3. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang RKP Desa Tahun 2022.
4. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mengingat** | : | 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor7 )
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;

10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;11.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomer 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005 – 20251. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang nomer 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019
2. Peraturan Bupati Magelang Nomer 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
3. Surat Edaran Setda Kabupaten Magelang tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Desa tahun 2021.
 |

**MEMUTUSKAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Menetapkan**  | **:** |  |
| KESATU | : | MEMBAHAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (Rkpdes) TAHUN 2022 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA. |
| KEDUA  | : | MENYEPAKATI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2022 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA. |
| KETIGA | : | KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Disepakatidi : WONOGIRIPada Tanggal : 16 September 2021  |
|  | BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )DESA WONOGIRIKETUABAMBANG PRIYANTO |

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor : 180.192/195 /2001 / 2021

Nomor : 12/ BPD.S/ IX/2021

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA WONOGIRI

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

(RKPDesa) TAHUN 2022

Pada hari ini rabu tanggal enam belas bulan september tahun dua ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. JUNARSIH : Kepala Desa Wonogiri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Wonogiri selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. BAMBANG PRIYANTO : Ketua / ~~Wakil Ketua~~ / ~~Anggota~~ BPD Desa Wonogiri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wonogiri selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA**telah membahas dan menyepakati RKPDesa 2022 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan RKPDesa 2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKPDesa 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda tangani Berita Acara ini.

4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Kajoran untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK PERTAMA****JUNARSIH** | **PIHAK KEDUA****BAMBANG PRIYANTO** |

|  |
| --- |
| https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRapJfze96iyQbvbTsdrHRRTpABmecbnLshRrNMFVqyprdRXKMu**KEPALA DESA WONOGIRI KECAMATAN KAJORAN****KABUPATEN MAGELANG** |

### PERATURAN DESA WONOGIRI

**NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)**

**TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA WONOGIRI,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang  | : | 1. bahwa pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan dasar dari Pembuatan Peraturan Desa Anggaran Dasar dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2022;
2. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh tim penyusun RKPDes dalam hal ini adalah yang ditunjuk dalam Musrenbangdes tahun 2020, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana huruf a dan b, perlu membuat peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) oleh Kepala Desa;
 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |
| Mengingat | : | 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor7 )
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;

10.Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;11.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomer 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005 – 202512.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang nomer 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014-20191. Peraturan Bupati Magelang Nomer 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Memperhatikan | :  | * + 1. Surat Edaran Setda Kabupaten Magelang tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Desa tahun 2021.
 |

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOGIRI**

**dan**

**KEPALA DESA WONOGIRI**

**MEMUTUSKAN :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Menetapkan** | **:** | **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2022** |
|  |  |

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang
2. Pemerintah Daerah adalahPemerintah Kabupaten Magelang
3. Bupati adalah Bupati Magelang
4. DewanPerwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Magelang
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakt setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hakasal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara KesatuanRepublik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BadanPermusyawaratanDesa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.

**BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa**

**Pasal 2**

1. Rencana RKP-Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa yang ditunjuk dalam Musrenbangdesa yang terdisri dari unsure Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat/kelembagaan desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun rancangan RKP-Desa, Tim Penyususn RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKP-Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKPDesa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa
4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP-Desa, dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun 2022 dalam bentuk Dokumen RKPDesa;
5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat;
6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa menetapkan RKP –Desa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkan dalam Lembaran Desa.

**BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN**

**RKPDesa 2022**

**Pasal 3**

1. BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam mengambil keputusan;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

**BAB IV**

**VISI DAN MISI**

##### Pasal 4

Visi : *“*TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA WONOGIRI YANG MAJU DAN AMANAH BERLANDASKAN MUSYAWARAH DAN GOTONG ROYONG”

##### Pasal 5

Misi :

1. Mengoptimalisasikan potensi Sumber Desa Alam Desa;

2. Meningkatkan sumber daya manusia;

3. Meningkatkan pelayanan kesehatan;

4. Meningkatkan sarana prasarana untuk kepentingan masyarakat;

5. Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan birokrasi dan tata kelola

 pemerintahan yang transparan dan akuntabel;

6. Memberikan layanan kepada pendidikan yang berada dibawah

 pemerintah desa : tpq, taman baca, paud desa dan lainnya;

7. Meningkatkan kerjasama antar lembaga desa yang ada dan juga

 meningkatkan tali silaturokhim kepada semua elemen masyarakat

**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**Pasal 6**

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kwalitas dan kwantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

**Pasal 7**

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Belanja operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. PenguatanBUMDesa;
11. Program peningkatan pelayanan kesehatan;
12. Program kebutuhan primer Sandang;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.
17. Program pembangunan moral dan akhlak
18. Program pembangunan infrastruktur berkelanjutan
19. Program Penanganan Kebencanaan, Darurat dan Mendesak
20. Pencegahan dan Penaggulangan Covid-19
21. Percepatan penguatan ekonomi masyarakat pasca dampak covid-19

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKPDesa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 10**

Peraturan Desa tentang RKPDesa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

  Ditetapkan di : Wonogiri

Pada tanggal:17 September 2020

KEPALA DESA WONOGIRI

JUNARSIH

Diundangkan di Desa Wonogiri

Pada tanggal 17 September 2020

Sekretaris Desa

MUHAMMAD KHUSNI AL AMIN

NIP:

Lembaran Desa Wonogiri Tahun 2020 Nomor 06



KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI KECAMATAN KAJORAN

Nomor : 180.192/10/KEP/ 2001/ 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKPDESA

TAHUN 2022

KEPALA DESA WONOGIRI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | **:** | a. | Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes; |
|  |  | b. | Bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKPDes. |
|  |  | c. | Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (Tim Penyusun RKPDes). |
| Mengingat | : | 1. | Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) |
|  |  | 2. | PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; |
|  |  | 3. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; |
|  |  | 4. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; |
|  |  | 5. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; |
|  |  | 6. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; |
|  |  | 7. | Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa; |
|  |  | 8. | Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; |
|  |  | 9. | Peraturan Bupati Magelang Nomer 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa; |
|  |  | 10. | Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; |
|  |  | 11. | Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020; |
|  |  | 12. | Surat Edaran Setda Kabupaten Magelang No. 050/1646/13/2020 Tahun 2020tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Desa tahun 2020. |
|  |  |  |  **MEMUTUSKAN :** |
| Menetapkan: |  |  |  |
| KESATU  |  | : | Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2022 sebagai berikut : |
| PembinaKetua Sekretaris   | ::: | 1.2.3.4.5.6.7. | JUNARSIHM.KHUSNI AL AMINNURIL IMRONMAKMURONATIQ ISROATUN NNUR HIDAYATIYUDI PURWANTO | ( Kepala Desa )(Sekretaris Desa)( Aparatur Desa )( Aparatur Desa )( KPMD )( TP PKK )( LPP ) |
| Kedua |  | : | Tugas dan Tanggung jawab Tim Penyusun RKPDes adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes); |
| Ketiga |  | : | Tahun 2022 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif. |
| Keempat |  | : | Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKPDes mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No.111/2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri N0. 114/2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans. N0 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Permendes, PDT dan Trans. No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022; |
| Kelima |  | : | Tim Penyusun RKPDes dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten. |
| Keenam |  | : | Masa tugas Tim Penyusun RKPDes terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP tahun 2022 oleh Kepala Desa |
| Keenam  |  | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

 Ditetapkan di : Wonogiri

 Pada Tanggal : 2 Agustus 2021

 KEPALA DESA WONOGIRI

 JUNARSIH